

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

Hana Setyaningsih¹, Nabila Septiana Putri²

Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

hanastyngsh@gmail.com, nabilaspt559@gmail.com

Abstract. *This research aims to assess how efficient and effective regional financial management in Semarang Regency utilizing secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) for the years 2018–2022. Data were collected through literature study, non-behavioral observations, and data analysis using efficiency ratio and effectiveness ratio. The results showed that the level of efficiency of Semarang Regency's regional financial management fluctuated and was generally inefficient, with a ratio ranging from 91% to 108.51%. Meanwhile, The efficiency of local financial management tends to be better, with a ratio ranging from 93.62% to 121.10%. Therefore, the Semarang Regency government is advised to increase Regional Original Revenue (PAD) and optimize the efficiency of financial management through improving the quality of human resources.*

Keywords: *Efficiency, Effectiveness, Regional Finance*

Abstrak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai seberapa efisien dan efektif pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Semarang selama periode 2018-2022 dengan memakai data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data dikumpulkan dengan studi literatur, observasi non-perilaku, dan analisis data menggunakan rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Hasil penelitian membuktikan yakni tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Semarang berfluktuasi dan umumnya tidak efisien, dengan rasio yang berkisar antara 91% hingga 108,51%. Sementara itu, tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah cenderung lebih baik, dengan rasio berkisar antara 93,62% hingga 121,10%. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Semarang disarankan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan efisiensi pengelolaan keuangan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kata kunci: efisiensi, efektivitas, keuangan daerah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manajemen keuangan daerah yang efektif dan efisien diperlukan untuk merealisasikan otonomi daerah dan desentralisasi. Keberhasilan suatu daerah tidak bisa dipisahkan dari aspek pengendalian keuangan daerah. Pengendalian keuangan daerah wajib dijalankan sesuai dengan peraturan dan diorganisir dengan baik, sehingga bisa berjalan secara efektif, efisien, transparan, ekonomis, dan bertanggung jawab serta memiliki prinsip-prinsip keadilan, kelayakan, dan manfaat suatu program bagi ekonomi daerah (Anugrahwaty, et al., 2021). Dengan mengelola anggaran secara efisien, pemerintah daerah dapat memprioritaskan penggunaan dana untuk sektor-sektor yang membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat.

Kabupaten Semarang, salah satu dari wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, memperoleh pengakuan dari Menteri Keuangan RI atas kinerja manajemen dan pelaporan keuangan yang dinilai baik selama delapan tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Semarang sudah menjalankan bermacam usaha untuk menaikan efisiensi dan kehandalan manajemen keuangan daerah. Capaian pertumbuhan ini dapat dilihat dari tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1

Pertumbuhan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022

Tahun	Penerimaan (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Pengeluaran (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2018	2.117.416.567		2.171.799.811	
2019	2.212.881.804	4,51	2.312.242.117	6,47
2020	2.362.080.875	6,74	2.191.412.621	(5,23)
2021	2.417.282.770	2,34	2.198.880.662	0,34
2022	2.337.453.499	(3,30)	2.536.331.344	15,35

Sumber: BPS Kabupaten Semarang (Data di olah)

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Firmansyah (2022) yang menganalisis tentang kesanggupan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang selama tahun anggaran 2019-2020, mengungkapkan bahwa kabupaten ini mempunyai efektivitas keuangan yang “sangat efektif”, dengan peningkatan sebanyak 5,85% dalam periode tersebut. Meskipun efektivitasnya tinggi, keefisienan keuangan Kabupaten Semarang dikategorikan sebagai “kurang efisien”, dengan taraf keefisienan lebih dari 100%. Selain itu, terjadi peningkatan kemandirian keuangan sebesar 3,96% yang menunjukkan pola hubungan “konstruktif” dalam mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Di samping itu, berlandaskan analisis nilai desentralisasi fiskal menunjukkan kenaikan kapabilitas keuangan sebanyak 1,47% dengan kategori “cukup” pada tahun 2020.

Dari tabel 1 di atas, bisa dilihat yakni realisasi penghasilan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini menandakan adanya penurunan kapasitas fiskal, yang ditandai dengan penurunan kemandirian daerah tahun 2022 sebesar 20,55% atau turun 3,27% dari tahun 2021 sebesar 23,82% (Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/61 2023). Selain itu, dalam keputusan gubernur tersebut juga dijelaskan tentang capaian SILPA Kabupaten Semarang dari tahun ke tahun, jadi bisa diketahui

yakni persentase SILPA terhadap belanja daerah mengalami fluktuasi walaupun realisasi tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat berikut ini:

Tabel 2

Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019-2022

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	175.630.364.280	2.312.242.117.310	7,60
2020	188.708.254.800	2.191.412.621.750	8,61
2021	405.905.362.672	2.198.880.662.286	18,46
2022	192.027.517.959	2.536.331.344.170	7,57

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/61 2023

Dengan begitu, di masa depan yang akan datang Pemerintah Kabupaten Semarang perlu lebih teliti dalam memperkirakan pendapatan, mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah, dan memanfaatkan penghematan pengeluaran agar dapat mengurangi jumlah SILPA pada tahun berjalan. Selain itu, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Semarang pun menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah (Salsabila, 2022). Opini BPK dapat memberikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah dan sejauh mana pemerintah daerah telah mematuhi standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangannya.

Oleh karena itu, analisis terhadap keefisienan dan keefektifan pengendalian keuangan daerah di Kabupaten Semarang dipilih selaku subjek penelitian ini. Analisis ini diharapkan dapat memberikan saran yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja manajemen keuangan daerahnya. Di daripada itu, analisis ini pun bisa dipakai sebagai evaluasi bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Rumusan Masalah

Didasarkan permasalahan tersebut, muncul pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada artikel ini adalah:

“Bagaimanakah tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2018-2022?”

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Efisiensi dan Efektivitas

Handoko mendefinisikan efisiensi sebagai kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan secara akurat (Anugrahwaty, et al., 2021). Hal ini ialah perbandingan diantara *output* (hasil) dan *input* (sumber daya). Sebuah pekerjaan dianggap efisien jika dapat menghasilkan *output* yang melebihi *input* yang dipakai (tenaga kerja, bahan, dana, peralatan, dan waktu). Makna efisiensi berhubungan beserta konsep produktivitas yang dicapai dengan *input* yang digunakan. Semakin rendah penggunaan *input* untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu maka semakin efisien.

Sedangkan efektivitas menurut Handoko merupakan keahlian untuk menetapkan tujuan yang sesuai dan memilih alat yang akurat untuk meraih tujuan tersebut (Anugrahwaty, et al., 2021). Efektivitas tidak berfokus pada jumlah dana yang dipakai untuk meraih sasaran, melainkan hanya mengevaluasi benarkah sebuah program atau aktivitas sudah berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Efisiensi dan efektivitas menjadi dua indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pada pengelolaan keuangan daerah, efisiensi berkaitan dengan bagaimana sumber daya dipakai agar meraih hasil yang diharapkan dengan biaya serendah mungkin. Keuangan daerah dapat dikatakan efisien jika memiliki presentasi rasio efisiensi di bawah 60% (Rahman & Saputra, 2022). Sedangkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan sejauh mana tujuan atau target telah tercapai. Manajemen keuangan daerah dianggap efektif jikalau target yang dipersiapkan berhasil diraih dengan mematuhi lima prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah, yaitu akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi, serta pengendalian (Khafiza & Subadriyah, 2018).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Widajatun dan Kristiastuti (2020) menyatakan yakni salah satu prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah ialah akuntabilitas, yaitu menekankan bahwa setiap transaksi harus dapat dilacak keabsahan hukumnya untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan. Akuntabilitas membutuhkan perilaku pengambil keputusan yang sesuai

dengan mandat yang diterima. Akuntabilitas dalam prinsip pengelolaan keuangan daerah berarti mengambil keputusan yang amanah, sehingga untuk mencapai keberhasilan program atau kebijakan yang telah direncanakan dapat dikomunikasikan secara vertikal dan horizontal kepada masyarakat (Rachman & Saputra, 2022).

Selain itu, menurut Widajatun dan Kristiastuti (2020) dalam pengelolaan keuangan daerah penting adanya transparansi, yaitu prinsip yang mengharuskan pemerintah daerah terbuka dalam memberi informasi tentang pengelolaan penyediaan informasi publik kepada pihak yang membutuhkannya. Transparansi diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang jujur, akurat, dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga mencerminkan kinerja pemerintah daerah secara benar. Transparansi memungkinkan pemangku kepentingan menciptakan keputusan ekonomi, sosial, dan politik berlandaskan informasi keuangan yang disediakan oleh pemerintah. Diharapkan bahwa menerapkan keterbukaan dalam pengendalian keuangan daerah bisa menaikkan kapabilitas pemerintah daerah, karena menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari ketidakberesan.

Di samping dua hal tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widajatun dan Kristiastuti (2020), pengawasan keuangan daerah juga menjadi hal yang penting untuk memastikan keselarasan antara pelaksanaan tugas pemerintah dan kelancaran pemerintahan secara efisien. Pengawasan ini adalah langkah konkret dan efektif dalam menegakkan disiplin di kalangan pegawai organisasi. Dengan pengawasan yang efisien, proses akan berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil kerja yang terbaik.

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi dan peraturan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah ialah salah satu kebijakan utama yang menata lingkup keuangan daerah, termasuk komitmen daerah, pajak dan retribusi daerah, pendapatan dan belanja daerah, dan kekayaan daerah. Selain itu, kebijakan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 berfungsi sebagai panduan teknis mengenai pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menentukan Dasar-dasar untuk mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Semua regulasi dan peraturan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pada pengelolaan keuangan daerah.

Pengukuran Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan atau rasio diantara *output* yang didapatkan dan *input* yang dipakai (Anggriani dalam Anugrahwaty, 2021). Rasio efisiensi menampilkan perbandingan diantara total biaya yang ditanggung oleh pemerintah daerah dengan penghasilan aktual yang didapat. Dengan demikian, rumus yang dipakai untuk menilai efisiensi ialah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Pengukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan perbandingan diantara hasil atau *output* nyata dengan tujuan atau target *output* yang diharapkan (Anggriani dalam Anugrahwaty, 2021). Rasio efektivitas ialah perbandingan yang mengilustrasikan kesanggupan pemerintah daerah untuk mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah dipersiapkan dengan tujuan yang ditentukan berlandaskan potensi sebenarnya dari daerah tersebut. (Halim dalam Hafan, 2019). Rasio efektivitas bisa dirumuskan dengan berikut ini:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{PAD Realisasi}}{\text{PAD Anggaran}} \times 100\%$$

METODOLOGI

Metode Pengumpulan Data

Data sekunder dikumpulkan memakai metode studi literatur, metode observasi non-perilaku, dan metode analisis data. Studi literatur dipakai untuk menghimpun dan mempelajari teori tentang analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan artikel ini. Metode observasi non-perilaku dipakai untuk menghimpun data tentang implementasi realisasi anggaran dan fakta relevan dari objek tentang yang diperoleh dari BPS Kabupaten Semarang. Metode analisis data dilakukan agar menganalisis hasil pengolahan data yang telah diperoleh, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus rasio untuk analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang tahun 2018-2022.

Metode Analisis

Rasio efisiensi menentukan seberapa efisien pengelolaan keuangan daerah. Mardiasmo mengatakan bahwa semakin besarnya *output* dibandingkan *input*, jadi semakin besar tingkat efisiensi sebuah organisasi (Manopo, et al., 2019). Menurut Bisma dan Susanto dalam Hafan (2019), kriteria untuk menilai efisiensi adalah sebagai berikut:

- Lebih dari 100%: Tidak efisien
- 90% hingga 100%: Kurang efisien
- 80% hingga 90%: Efisien
- 60% hingga 80%: Cukup efisien
- Kurang dari 60%: Sangat efisien

Sedangkan untuk menentukan seberapa efektif pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah kriteria efektivitas menurut Bisma dan Susanto dalam Hafan (2019):

- Lebih dari 100%: Sangat efektif
- 90% hingga 100%: Efektif
- 80% hingga 90%: Cukup Efektif
- 60% hingga 80%: Kurang Efektif
- Kurang dari 60%: Tidak efektif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Tingkat keefisienan pengelolaan keuangan daerah dinilai dari penilaian rasio antara penerimaan daerah di antara penghasilan daerah dengan pengeluaran teratur, semakin kecil rasio diantara penghasilan daerah dengan pengeluaran teratur jadi lebih efisien pengelolaan keuangan daerah itu.

Tabel 3

Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Efisiensi (%)
2018	2.117.416.567	2.171.799.811	102.57
2019	2.212.881.804	2.312.242.117	104.49
2020	2.362.080.875	2.191.412.621	92.78
2021	2.417.282.770	2.198.880.662	91
2022	2.337.453.499	2.536.331.344	108.51

Sumber : BPS Kabupaten Semarang (Data di olah)

Hasil perbandingan realisasi pengeluaran teratur dan realisasi pendapatan daerah jadi taraf keefisienan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Semarang diberikan pengukuran dengan syarat pengukuran menggunakan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 mengenai aturan tersebut dinilai dengan berikut ini :

Tabel 4
Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)

Presentase kinerja keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah dari 60%	Sangat efisien

Dari kriteria kinerja di tabel 4 dapat di ambil kesimpulannya yaitu mengenai tingkat keefisienan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Semarang pada periode 2018-2022 memperlihatkan skala keefisienan yang fluktuatif dimana rasionya naik turun. Pada tahun 2018 tingkatannya berada pada nilai 102.57% atau berada pada tingkat tidak efisien, ditahun selanjtnya 2019 kriteria masih kurang efisien menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya dengan presentase nilai diatas 100% yaitu 104.49%. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan presentase sebesar 92.78% dan 91% kondisi pengelolaan keuangan daerah di tahun kedua tersebut terlihat belum kurang praktis. Setelah itu pada tahun 2022 rasio naik sebesar 108.51%. Hal tersebut menunjukkan kalau sistem pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah Kabupaten Semarang terjadi fluktuatif dan tergolong tidak efisien.

Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

Guna melihat efektifitas pengelolaan keuangan daerah dinilai dari penilaian semakin tinggi rasio antara pendapatan yang tercapai dengan target pendapatan, semakin efektif manajemen keuangan daerah tersebut.

Tabel 5
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)
2018	2.079.500.000	2.117.420.000	101.82
2019	2.212.880.000	2.311.150.000	104.44
2020	2.362.080.000	2.211.270.000	93.62
2021	1.996.140.000	2.417.280.000	121.10
2022	2.443.240.000	2.337.450.000	95.67

Sumber : DPJK Kementerian Keuangan Kabupaten Semarang

Untuk melihat hasil perbandingan dari target penerimaan dengan realisasi penerimaan, dengan itu keefektifan manajemen keuangan daerah Kabupaten Semarang diserahkan pengukuran dengan syarat penilaian memakai Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 mengenai aturan evaluasi dan pencapaian kinerja keuangan yang diatur dengan berikut ini:

Tabel 6
Kriteria Kinerja Keuangan (Efektivitas)

Presentase kinerja keuangan	Kriteria
100% ke atas	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Di bawah dari 60%	Tidak efektif

Berdasarkan hasil perhitungan keefektifan pengelolaan keuangan daerah pada periode 2018 dan 2019 sangat efektif karena tingkat efektifnya mencapai 101.82% dan 104.44%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan tingkat efektivitasnya sebesar 93.62%. Setelah itu tahun 2021 mengalami kenaikan tingkat efektivitasnya sebesar 121.10%. Dan pada tahun terakhir 2022 mengalami penurunan tingkat efektivitasnya sebesar 95.67% dinilai efektif. Dilihat dari presentase tingkat efektivitasnya Kabupaten Semarang cukup efektif dalam kriteria kinerja keuangannya walaupun dinilai fluktuasi setiap tahunnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, jadi bisa di tarik kesimpulan berikut ini : Pada tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Semarang dikatakan tidak efisien. Dilihat pada tahun 2018 dengan nilai presentase sebesar 102.57% yang dimana terbilang tidak efektif dan terus mengalami fluktuasi pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan nilai presentase sebesar 92.78% dan 91% dinilai cukup efisien. Namun pada tahun 2022 Kabupaten Semarang mengalami kenaikan presentase yang cukup drastis dari tahun sebelumnya dengan nilai presentase yaitu 108.51%. hal ini menggambarkan yakni bentuk pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Semarang masih tidak baik adatu tidak efisien. Bedasarkan hasil nilai dari penilaian keefektifan pengelolaan keuangan daerah tahun 2018 – 2022 dinilai tingkat efektivitas yang dilakukan senilai 93.62% sampai dengan 104.44%. Nilai

target ini menunjukkan yakni efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Semarang dalam mengatur keuangan daerahnya makin meningkat.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan, jadi selaku implikasinya disampaikan saran seperti berikut ini :

Pemerintah daerah Kabupaten Semarang perlu meningkatkan penerimaan daerahnya terutama yaitu PAD. Perlunya meningkatkan potensi sumber pendapatan Kabupaten Semarang yang belum ditingkatkan dengan maksimal.

Pada tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah masih tergolong tidak efektif, karena itu perlunya peningkatan keefisienan rasio untuk mencapai tingkat sangat efisien dengan rasio 60% kebawah.

Pada tingkat efektivitasnya pengelolaan keuangan daerah mencapai target yang ditetapkan, menggambarkan yakni pemerintah daerah paling efektif dalam mengatur keuangan daerahnya terutama dalam hal pendapatan daerah.

Maka dari itu pemerintah daerah dalam mengembangkan pembangunan di era otonomisasi daerah perlu meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan juga pelatihan berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah lalu dapat membagikan sebuah SDM sesuai dengan *passion* dibidang masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrahwaty, N., Mediaty, & Jusni. (2021). Analysis of Efficiency and Effectiveness of Regional Financial Management in Mamuju District, Mamuju Regency. *Quest Journals: Journal of Research in Business and Management*, 9(12), 73-80.
- BPS Jawa Tengah. (2020). Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Semarang Menurut Jenis Penerimaan (Ribuan Rupiah), 2018-2020. Retrieved May 24, 2024, from <https://jateng.bps.go.id/indicator/13/1227/1/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-semarang-menurut-jenis-penerimaan.html>
- BPS Jawa Tengah. (2020). Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang Menurut Jenis Pengeluaran (Ribuan Rupiah), 2018-2020. Retrieved May 24, 2024, from <https://jateng.bps.go.id/indicator/13/1263/1/realisasi-pengeluaran-pemerintah-kabupaten-semarang-menurut-jenis-pengeluaran.html>
- Firmansyah, A. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019-2020. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang (SINOV)*, 4(2), 41-49.
- Hafan, F. A. (2019). Analysis of The Performance of Regional Financial Management and The Effect on Poverty Levels in Magelang Regency. *Journal of Applied Economics in Developing Countries*, 4(2), 72-79.
- Khafiza, L., & Subadriyah. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 2(1), 36-52.
- Manopo, N., Rotinsulu, D. C., & Murni, S. (2019). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 17(2).
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 22(2), 117-126.
- Salsabila, S. (2022). Analisis pengaruh dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Semarang. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Widajatun, V. W., & Kristiastuti, F. (2020). The Effect of Regional Financial Supervision, Accountability, and Transparency of Regional Financial Management on Local Government Performance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(4), 2966-2974.